

# **RENJA**

## **RENCANA KERJA**

### **2023**



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**INSPEKTORAT**

ꦲꦶꦤꦶꦥꦠꦺꦫꦶꦩꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦏꦂꦠ

Kompleks Youth Centre, Jalan Kebon Agung, Tlogodadi, Mlati, Kabupaten, Sleman  
Telepon (0274) 562009 Faksimile (0274) 512567

Website: <http://inspektorat.jogjaprovo.go.id> Email: [inspektorat@jogjaprovo.go.id](mailto:inspektorat@jogjaprovo.go.id) Kode Pos 55286

**KEPUTUSAN**  
**INSPEKTUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR : 10 / KPTS / 2022

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)**  
**INSPEKTORAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**TAHUN 2023**

INSPEKTUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap Perangkat Daerah harus menyusun dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Tim Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 sebagaimana dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah:
- a. Menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD;
  - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun sebelumnya;
  - c. Menetapkan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja yang dicapai Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023 berdasarkan Renstra dan RKPD;
  - d. Menyusun rencana kerja perangkat daerah yang terdiri :
    - Rancangan Awal Renja Tahun 2023;
    - Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Tahun 2023;
    - Rancangan Renja Tahun 2023;
    - Rancangan Akhir Renja Tahun 2023.
  - e. Melaksanakan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan awal rencana kerja perangkat daerah.
- KETIGA Rencana Kerja Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta c.q. Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : di Yogyakarta  
Pada tanggal : 12 Januari 2022

PIL. INSPEKTUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN INSPEKTUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR : 10 /KPTS/2022  
TANGGAL : 12 Januari 2022

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
INSPEKTORAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Ketua	Sumadi, SH, MH	Plt. Inspektur DIY
II.	Sekretaris	Yudi Ismono, S.Sos. M.Acc	Sekretaris Inspektorat DIY
III.	Anggota	1. B. Norowisnu, S.Kom, M.Hum.	Kasubbag Program dan Monev
		2. Lis Dwi Rahmawati, SE., M.Acc.	Kasubbag Keuangan
		3. Dian Rohmawati, S.Si., MAP	Staf Sub Bagian Program dan Monev
		4. Nur Laili Rahmawati, SE	Staf Sub Bagian Program dan Monev
		5. Dessy Nur Fauziah, S.STP	Staf Sub Bagian Program dan Monev

PIL INSPEKTUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
INSPEKTORAT  
SUMADI



## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 telah selesai disusun sebagaimana mendasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

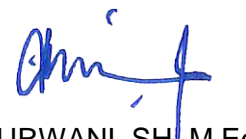
Dengan mengacu Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023 dan berpedoman pada Renstra Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 2026, maka disusunlah Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah untuk 1 (satu) tahun.

Besar harapan kami, usul dan saran perbaikan atas Rancangan Akhir Renja Inspektorat DIY Tahun 2023.

Yogyakarta,

2022

Plt. INSPEKTUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



AMIN PURWANI, SH, M.Ec., Dev.  
NIP. 19680713 199803 2 003

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB 1           PENDAHULUAN.....</b>	<b>1-1</b>
1.1        Latar Belakang.....	1-1
1.2        Landasan Hukum.....	1-2
1.3        Maksud dan Tujuan.....	1-2
1.4        Sistematika Penulisan .....	1-3
<b>BAB 2           HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DIY TAHUN 2021.....</b>	<b>2-1</b>
2.1        Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	2-1
2.2        Analisis Kinerja Pelayanan .....	2-20
2.3        Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	2-27
2.4        Review Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 .....	2-33
2.5        Penelaahan Program dan Usulan Kegiatan Masyarakat .....	2-46
<b>BAB 3           TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>3-1</b>
3.1        Tujuan dan Sasaran .....	3-1
3.2        Program dan Kegiatan .....	3-2
<b>BAB 4           RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>4-1</b>
<b>BAB 5           PENUTUP.....</b>	<b>5-1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2021 Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta .....	2-9
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	2-21
Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 ...	2-34
Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta .....	3-5
Tabel 4. Rencana Kerja Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Indikatif Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 .....	4-2



# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian *tujuan (comon goals)* dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak maka setiap SKPD harus menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sah dan harus dilaksanakan.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Renja SKPD adalah dokumen rancangan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023 dan berpedoman pada Renstra Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Inspektorat DIY Tahun 2023 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomorklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025.
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 2026;
12. Peraturan Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyusunan Rancangan Akhir RKPD, Inspektorat DIY menyusun Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2023 dengan maksud melaksanakan tugas dan fungsi untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan arah yang jelas dan pedoman pelaksanaan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2023.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan

Bab 2 Hasil Evaluasi Renja Inspektorat Tahun Yang Lalu dan Capaian Renstra  
Perangkat Daerah

Bab 3 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab 5 Penutup

## **BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DIY TAHUN LALU**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Pada tahun anggaran 2021 ini mulai diterapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat pada tahun anggaran 2021 ditetapkan 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - 1.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - 1.1.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    - 1.1.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
    - 1.1.6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - 1.1.7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 1.2.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- 1.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 1.2.4. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1.3.1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - 1.3.2. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implentasi Peraturan Perundang-undangan
- 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 1.4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 1.4.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 1.4.5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
  - 1.4.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 1.4.7. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - 1.4.8. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 1.5.2. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 1.6.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 1.7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 1.7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
  - 2.1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
    - 2.1.1. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
    - 2.1.2. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
    - 2.1.3. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
    - 2.1.4. Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
    - 2.1.5. Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
    - 2.1.6. Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal
    - 2.1.7. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
  - 2.2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
    - 2.2.1. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
    - 2.2.2. Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
3. Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi
  - 3.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
    - 3.1.1. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
    - 3.1.2. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
  - 3.2. Kegiatan Asistensi dan Pendampingan
    - 3.2.1. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
    - 3.2.2. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
    - 3.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
    - 3.2.4. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian kinerja tahun 2021 secara umum dapat dicapai dengan baik. Sampai akhir Desember 2021 realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp37.188.614.109,00 atau 93.59% dari alokasi anggaran Rp39.734.364.969,00. Anggaran tersebut terdiri belanja operasi sebesar Rp20.255.434.969,00 dan belanja modal sebesar Rp19.478.930.000,00.

Pencapaian hasil realisasi kinerja tahun 2021 sesuai indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta target pencapaiannya adalah sebagai berikut:

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Capaian
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	1. Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan 2. Persentase peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 3. Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%
1.1.	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Tercapainya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dalam rangka mendukung program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%
1.1.1.	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	1. Tersusunnya dokumen tahunan (tahun n+1 dan perubahan tahun n) dan lima tahunan OPD 2. Laporan Hasil Forum OPD	3 dokumen 1 BA	3 dokumen 1 BA
1.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA tahun n+1	1 dokumen	1 dokumen
1.1.3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA Perubahan tahun n	1 dokumen	1 dokumen
1.1.4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA tahun n+1	1 dokumen	1 dokumen
1.1.5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA Perubahan tahun n	1 dokumen	1 dokumen
1.1.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP)	1 dokumen	1 dokumen
1.1.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	100%	100%
1.2.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tercapainya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah untuk mendukung program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%
1.2.1.	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	tersedianya pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun
1.2.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan tahunan OPD	1 laporan	1 laporan

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Capaian
1.2.3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, dokumen perencanaan anggaran	12 dokumen	12 dokumen
1.2.4.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya LRA sem 1 dan Laporan Prognosis semester berikutnya	1 laporan	1 laporan
<b>1.3.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tercapainya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah untuk mendukung program penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.3.1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Aparatur yang meningkat kemampuannya melalui diklat	15 orang	15 orang
1.3.2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1. Daftar Penilaian Angka Kredit 2 periode dalam 1 tahun 2. Aparat pengawasan yang meningkat kemampuannya melalui Bimtek	75 orang 6 angkatan	75 orang 6 angkatan
<b>1.4.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tercapainya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah untuk mendukung program penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen peralatan kelistrikan dan bangunan kantor	6 jenis	6 jenis
1.4.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tabung pemadam kebakaran	3 buah	3 buah
1.4.3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Barang cetakan 2. Jumlah materi yang digandakan	12 jenis 71360 lbr	12 jenis 71360 lbr
1.4.4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Bukti pembayaran Langganan surat kabar/majalah	12 bulan	12 bulan
1.4.5.	Penyediaan Bahan/Material	Alat tulis kantor	17 jenis	17 jenis
1.4.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Laporan dan rencana tindaklanjut hasil rapat koordinasi 2. Laporan dan rencana tindaklanjut hasil konsultasi dan koordinasi	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan
1.4.7.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertatanya arsip aktif dan inaktif di SKPD	12 bulan	12 bulan
1.4.8.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersusunnya modul integrasi data kepegawaian	1 modul	1 modul
<b>1.5.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tercapainya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.5.1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Alat Studio sesuai RKBMD	1 unit	1 unit
1.5.2.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung tempat kerja Tahap II	100%	100%
<b>1.6.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tercapainya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.6.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembelian Materai	271 buah	271 buah
1.6.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bukti pembayaran rekening telepon 5 sambungan, rekening listrik 500 Kwh, rekening air 10 m3	12 bulan	12 bulan
1.6.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Gedung kantor seluas 1.838,38 m2 yang terpelihara kebersihannya 2. Pelayanan umum kantor yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan



No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Capaian
1.7.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tercapainya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.7.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti Pembayaran Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 2</li> <li>2. Kendaraan dinas/operasional roda 2 yang dipelihara sesuai RKPBMMD</li> <li>3. Bukti Pembayaran Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 4</li> <li>4. Kendaraan dinas/operasional roda 4 yang dipelihara sesuai RKPBMMD</li> </ol>	<p>4 unit</p> <p>4 unit</p> <p>13 unit</p> <p>13 unit</p>	<p>4 unit</p> <p>4 unit</p> <p>13 unit</p> <p>13 unit</p>
1.7.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara sesuai RKPBMMD</li> <li>2. Peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMMD</li> </ol>	<p>2 jenis</p> <p>7 jenis</p>	<p>2 jenis</p> <p>7 jenis</p>
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan, Perekonomian, Sosial Budaya serta Sarana dan Prasarana</b>	<b>88%</b>	<b>90.20%</b>
2.1.	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Tercapainya kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dalam rangka mendukung Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2.1.1.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah	16 IHP	16 IHP
2.1.2.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Cash Opname dan Stock Opname SKPD</li> <li>2. Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah</li> </ol>	<p>37 laporan</p> <p>137 LHP</p>	<p>37 laporan</p> <p>137 LHP</p>
2.1.3.	Reviu Laporan Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Evaluasi Kinerja OPD</li> <li>2. Laporan Review Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah DIY</li> <li>3. Laporan Review Dokumen Perencanaan SKPD DIY sebelum tanggal persetujuan RAPBD Tahun 2022</li> <li>4. Laporan Hasil Pendampingan dan Penyusunan Manajemen Resiko OPD</li> <li>5. Laporan Evaluasi LKJIP Pemerintah Daerah DIY</li> </ol>	<p>37 LHE</p> <p>1 laporan</p> <p>37 laporan</p> <p>37 laporan</p> <p>1 LHE</p>	<p>37 LHE</p> <p>1 laporan</p> <p>37 laporan</p> <p>37 laporan</p> <p>1 LHE</p>
2.1.4.	Reviu Laporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Review Laporan Keuangan Pemda DIY</li> <li>2. Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD</li> </ol>	<p>1 laporan</p> <p>37 laporan</p>	<p>1 laporan</p> <p>37 laporan</p>
2.1.5.	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Hasil Pemeriksaan Umum/Teknis Pemerintah Kab/Kota</li> <li>2. Laporan EKPPD Kab/kota</li> </ol>	<p>16 LHP</p> <p>5 laporan</p>	<p>16 LHP</p> <p>5 laporan</p>
2.1.6.	Kerjasama Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Telaah sejawat antar Inspektorat Provinsi</li> <li>2. Laporan telaah sejawat kabupaten/kota</li> </ol>	<p>1 laporan</p> <p>1 laporan</p>	<p>1 laporan</p> <p>1 laporan</p>
2.1.7.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Laporan hasil monitoring dan tindak lanjut temuan pemeriksaan	2 laporan	2 laporan
<b>2.2.</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Tercapainya kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu dalam rangka mendukung Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2.2.1.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	4 LHP	4 LHP
2.2.2.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	116 LHP	116 LHP

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja	Target	Capaian
3.	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan, Perekonomian, Sosial Budaya serta Sarana dan Prasarana</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
3.1.	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Tercapainya perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan fasilitasi pengawasan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
3.1.1.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1. Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT tahun 2022	1 SK	1 SK
		2. Laporan Gelar Pengawasan Daerah	1 laporan	1 laporan
3.1.2.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Laporan Pemutakhiran Tindaklanjut Hasil Pengawasan	2 laporan	2 laporan
3.2.	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Tercapainya kegiatan pendampingan dan asistensi dalam mendukung program perumusan kebijakan , pendampingan dan asistensi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
3.2.1.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pendampingan dan asistensi	4 laporan	4 laporan
3.2.2.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Pelaksanaan PMPRB DIY Tahun 2020	1 laporan	1 laporan
3.2.3.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1. Laporan triwulanan atas perkembangan pelaksanaan tugas Saberpungli tepat waktu	4 laporan	4 laporan
		2. Laporan Hasil monitoring dan evaluasi aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan Korupsi	1 laporan	1 laporan
		3. Laporan hasil pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah	1 laporan	1 laporan
		4. Laporan tindaklanjut perjanjian APIP dan APH	1 laporan	1 laporan

Pada tahun 2021 dari target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan, telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah direncanakan, namun demikian karena masih dalam masa pandemi dan pemulihan covid-19 dilakukan refocusing sesuai surat edaran Gubernur DIY Nomor 910/3178 tanggal 19 Februari 2021. Untuk menindaklanjuti hal tersebut diatas, Inspektorat telah melakukan *re-focusing* program, kegiatan, sub kegiatan yaitu antara lain:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan refocusing, yaitu pada:
  - kegiatan Administasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
  - kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, sub kegiatan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi berupa belanja perjalanan untuk peserta diklat ke luar daerah maka diklat dilaksanakan secara daring;
  - kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi berupa belanja makanan dan minuman rapat serta belanja perjalanan maka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi serta seminar, sosialisasi konsultasi dengan pusat dilakukan secara daring;

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

**Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat s/d Tahun 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama Perangkat Daerah : INSPEKTORAT

Lembar : 1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TahunLalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
1	Urusan Pemerintahan											
1	01	Bidang Urusan Pemerintahan										
1	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%	
1	01	01	01	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Tertatanya Arsip Aktif / In Aktif 12 bulan	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%
				Alat tulis kantor 19 jenis								
				Komponen instalasi listrik dan bangunan kantor 12 jenis								
				Pembelian Meterai								
				Pengiriman surat khusus perangko								
				Peralatam kebersihan dan bahan pembersih								
				Pengisian tabung pemadam kebakaran								
				Tagihan rekening telepon 5 sambungan, rekening listirk 500 Kwh, rekening air 10 m3								
				Langganan 4 jenis surat kabar harian								
				Tagihan internet up to 2 MBps								
				Paket pengiriman								

RANCANGAN AHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Retribusi sampah kantor								
					Jasa kebersihan gedung kantor								
					Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 2								
					Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 4								
					Barang cetakan								
					Penggandaan dokumen dokumen								
					Fumigasi arsip/Arsip terdigitalisasi								
					Pembelian buku								
1	01	01	02	Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran	Kinerja 1 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%
					Kinerja 9 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku								
					Kinerja 10 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK								
					Kinerja 1 orang pengurus barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku								
					Kinerja 1 orang penyimpan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku								
					Kinerja 1 orang perencana program dalam 1 tahun								
1	01	01	03	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi Dan Konsultasi	Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan dalam 1 tahun	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%
					Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun								
1	01	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%
1	01	02	107	Pembangunan Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	D E D gedung Kantor/Gedung Kantor	N/A	80%	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	26.67%
					Terselesaikannya pembangunan gedung tempat bekerja	-							

RANCANGAN AHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	02	108	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Perlengkapan kantor sesuai RKBMD 1 jenis	N/A	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A
					Peralatan kantor sesuai RKBMD 3 jenis								
					Meubeleir sesuai RKBMD 2 jenis								
1	01	02	111	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	AC Split sesuai RKBMD 30 unit	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%
					Perlengkapan gedung kantor sesuai RKBMD 13 jenis								
1	01	02	113	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKBMD 5 unit	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%
					Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKBMD 15 unit								
1	01	05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%
1	01	05	003	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu	Aparatur yang meningkat kemampuannya melalui diklat : 5 orang	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%
					Aparatur yang meningkat kemampuannya melalui Bimtek : 2 angkatan 55 org								
1	01	05	007	Pembinaan, pengembangan kualitas profesi dan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Daftar Penilaian Angka Kredit dan Karya Tulis JFA dalam 1 tahun	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%
1	01	06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%
1	01	06	016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMP, Renstra dan IKU)	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%
1	01	06	017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang ditetapkan	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%
1	01	06	018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD Serta Pengembangan Data dan Informasi	Dokumen Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan SKPD	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%

- kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat berupa belanja jasa pengiriman dokumen dan sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa belanja jasa listrik dan telpon karena gedung Inspektorat masih dalam proses pembangunan;
  - kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas dan operasional berupa belanja bahan bakar minyak dan pelumas karena adanya kebijakan WFH/WFO dan pembatasan pertemuan dengan obriik secara langsung.
- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan dilakukan refucosing, yaitu pada:
- kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah berupa belanja jasa audit karena terkait pandemi terdapat kebijakan pemberlakukan WFH/WFO, sub kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah berupa belanja makanan dan minuman rapat, belanja analisa laboratorium, belanja jasa audit karena kebijakan pemberlakukan WFH/WFO dan rapat koordinasi dilaksanakan secara daring;
- c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, yaitu pada:
- kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pegawasan berupa belanja perjalanan narasumber pusat, akomodasi hotel karena gelar pengawasan daerah dilaksanakan melalui daring, sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan berupa belanja makanan dan minuman harian umum, belanja perjalanan nara sumber pusat karena koordinasi AAIPi dan Rakorwasda dilaksanakan secara daring.
  - kegiatan Asistensi dan Pendampingan, sub kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi berupa belanja makanan dan minuman harian umum, belanja perjalanan nara sumber maka penilaian PMPRB dilaksanakan secara daring.
  - kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas berupa belanja paket survey karena anggaran Survey Penilaian Integritas ditanggung oleh DIPA KPK sesuai dengan Surat KPK Nomor B/1626/LIT.05/10-15/03/2021 tanggal 8 Maret 2021 perihal Kerjasama Survey Penilaian Integritas 2021.

Adapun rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja s.d. 2021 sebagaimana tabel dibawah ini:

RANCANGAN AHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Dokumen draft Renstra yang sesuai dengan RPJMD 2018-2022								
1	01	06	019	Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%
1	01	38		<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	N/A	109.70%	N/A	N/A	N/A	N/A	109.70%	36.56%
1	01	38	001	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%
					Laporan Pengukuran Kinerja Tahun Anggaran 2016								
					Laporan Evaluasi LKJiP								
					Laporan Hasil Pendampingan								
					Laporan Review Laporan Keuangan SKPD DIY								
					Laporan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY								
					Laporan Review RKA SKPD DIY								
					Laporan Monev SPIP SKPD								
					Laporan Telaah sejawat antar Inspektorat Provinsi								
					Laporan Pendampingan Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY SKPD								
					Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD								
					Laporan Cash Opname dan Stok Opname SKPD								
					Consulting dan Quality Assurance Pengawasan SKPD								
1	01	38	003	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Laporan monitoring dan evaluasi Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan Korupsi	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%
					Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah								
					Laporan Pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) DIY th 2018								
					Laporan Triwulanan atas perkembangan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli tepat waktu								

RANCANGAN AHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

1				2		3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	38	007		Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1	01	38	009		Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 5 daerah kabupaten/kota	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%
1	01	38	010		Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Rekapitulasi hasil pengawasan	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%
						Rekapitulasi hasil tindak lanjut pengawasan									
1	01	38	011		Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%
						Laporan Pajak-Pajak Pribadi PNS 5500 PNS									
1	01	38	014		Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	33.35%
6					<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>										
6	01				<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>										
6	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
6	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Hasil Forum OPD</li> <li>- Tersusunnya dokumen tahunan (tahun n+1 dan perubahan tahun n) dan lima tahunan OPD</li> </ul> Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: 1. Renstra : 1 dokumen 2. Renja : 1 dokumen 3. Renja Perubahan : 1 dokumen 4. Penetapan Kinerja : 1 dokumen	100%	N/A	100%	100%	100%	-	100%	200%	100%
6	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA tahun n+1	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	50%
6	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA Perubahan tahun n	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	50%
6	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya dokumen DPA tahun n+1</li> <li>- Tersusunnya dokumen RKA tahun n+1</li> <li>- Tersusunnya dokumen RKA Perubahan tahun n</li> <li>- Tersusunnya dokumen DPA Perubahan tahun n</li> </ul>	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	200%	100%



RANCANGAN AHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA Perubahan tahun n	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	50%
6	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP)	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	50%
6	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK : 100% - Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) : 1 dokumen	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	200%	100%
6	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
6	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- tersedianya pemenuhan gaji dan tunjangan ASN - terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	-	N/A	100%	100%	100%	-	100%	100%
6	01	01	1.01	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD: 1 tahun	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	50%
6	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Tersusunnya laporan keuangan tahunan OPD - Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan) : 1 dok	-	N/A	100%	100%	100%	-	200%	100%
6	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, dokumen perencanaan anggaran 1. Laporan Keuangan bulanan 2. Laporan Keuangan Triwulanan 3. Laporan Keuangan Semester	-	N/A	100%	100%	100%	-	100%	100%
6	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya LRA sem 1 dan Laporan Prognosis semester berikutnya	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	50%
6	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
6	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terfasilitasnya penilaian Angka Kredit bagi JFT dalam 2 periode	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	50%
6	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aparatur yang meningkatkan kemampuannya melalui diklat	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	3.85%	50.96%
6	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implentasi Peraturan Perundang-undangan	- Aparat pengawasan yang meningkatkan kemampuannya melalui Bimtek - Daftar Penilaian Angka Kredit 2 periode dalam 1 tahun	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	21.04%	55.26%

RANCANGAN AHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
6	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
6	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen peralatan kelistrikan dan bangunan kantor 6 jenis	100%	N/A	100%	100%	100%	200%	50%	
6	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tabung pemadam kebakaran 3 buah 1. Alat tulis kantor : 11 jenis 2. Penyediaan perlengkapan penatausahaan arsip :14 jenis	- 100%	N/A	100%	100%	100%	- 100%	200%	100%
6	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Barang cetakan 12 jenis - Jumlah materi yang digandakan 71360 lembar	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	200%	100%
6	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bukti pembayaran Langganan surat kabar/majalah 12 bulan	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	50%
6	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Alat tulis kantor 17 jenis	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	50%
6	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Laporan dan rencana tindak lanjut hasil konsultasi dan koordinasi,12 bulan - Laporan dan rencana tindak lanjut hasil rapat koordinasi, 12 bulan - Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi : 1 tahun - Tersedianya makanan dan minuman rapat koordinasi : 1 tahun	- 100%	N/A	100%	100%	100%	- 100%	200%	100%
6	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertatanya arsip aktif dan inaktif di SKPD 12 bulan	100%	N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	50%
6	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Tersusunnya modul integrasi data kepegawaian 1 modul - Blueprint pengembangan aplikasi pengawasan yang terintegrasi: 1 modul	- 100%	N/A	100%	100%	100%	- 100%	200%	100%
6	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
6	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Meubelair 11 jenis	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	200%	100^
6	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Alat Studio sesuai RKBMD : 1 jenis Tersedianya peralatan dan mesin lainnya: 1. Komputer : 3 unit 2. Lemari es : 2 unit 3. Televisi : 2 unit 4. Vertical blind : 343 m2 5. Trolley arsip : 1 unit 6. Tabung pemadam :10 unit	- 100%	N/A	100%	100%	100%	- 100%	200%	100%

RANCANGAN AHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	01	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung tempat kerja Tahap II : 100 %	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	50%
6	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya: Instalasi system hydrant :100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	50%
6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
6	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembelian Materai: 271 lembar Pembelian Materai :340 lembar	- 100%	N/A	100%	100%	100%	- 100%	200%	100%
6	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bukti pembayaran rekening telepon 5 sambungan, rekening listirk 500 Kwh, rekening air 10 m3 : 12 bulan	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	200%	100%
6	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Gedung kantor seluas 1.838,38 m2 yang terpelihara kebersihannya, : 12 bulan - Pelayanan umum kantor yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu : 12 bulan 1. Pembayaran jasa keamanan kantor:12 bulan 2. Pembayaran jasa kebersihan kantor: 12 bulan 3. Pembayaran jasa pelayanan driver: 12 bulan 4. Pembayaran retribusi sampah: 12 bln	- 100%	N/A	100%	100%	100%	- 100%	200%	100%
6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
6	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Bukti Pembayaran Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 2 : 4 unit - Bukti Pembayaran Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 4 : 13 unit - Kendaraan dinas/operasional roda 2 yang dipelihara sesuai RKBMD : 4 unit - Kendaraan dinas/operasional roda 4 yang dipelihara sesuai RKBMD : 13 unit	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	200%	100%

RANCANGAN AHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai RKBMD : 7 jenis - Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara sesuai RKBMD : 2 jenis Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya : 1. Komputer:23unit 2. Laptop : 20 unit 3. Mesin fotocopy : 1 unit 4. AC : 23 unit 5. LCD : 3 unit	-  100%	N/A	100%	100%	100%	-  100%	200%	100%
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	- Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan, - Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya, - Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian - Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana dan Prasarana	90%	N/A	88%	90,20%	102,50%	90%	192.50%	96,25%
6	01	02	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Internal									
6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah : 16 LHP	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	200%	100%
6	01	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	- Laporan Cash Opname dan Stock Opname SKPD : 37 laporan - Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah : 137 LHP	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	200%	100%
6	01	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja	- Laporan Evaluasi Kinerja OPD : 37 LHE - Laporan Evaluasi LKJIP Pemerintah Daerah DIY : 1 LHE - Laporan Hasil Pendampingan dan Penyusunan Manajemen Resiko OPD : 37 laporan - Laporan Review Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah DIY : 1 laporan - Laporan Review Dokumen Perencanaan SKPD DIY sebelum tanggal persetujuan RAPBD Tahun 2022 : 37 laporan	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	200%	100%
6	01	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan	- Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD : 37 laporan - Laporan Review Laporan Keuangan Pemda DIY : 1 laporan	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	200%	100%

RANCANGAN AHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	01	02	1.01	05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	- Laporan EKPPD Kab/kota : 5 laporan - Laporan Hasil Pemeriksaan Umum/Teknis Pemerintah Kab/Kota : 16 LHP	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	200%	100%
6	01	02	1.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	- Laporan Telaah sejawat antar Inspektorat Provinsi : 1 Laporan - Laporan telaah sejawat kabupaten/kota : 1 Laporan	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	200%	100%
6	01	02	1.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	- Laporan hasil monitoring dan tindaklanjut temuan pemeriksaan : 2 laporan	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	200%	100%
6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									
6	01	02	1.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah : 4 LHP	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	200%	100%
6	01	02	1.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu : 86 LHP	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	200%	100%
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENS	- Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan, - Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya, - Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian - Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana dan Prasarana	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	200%	100%
6	01	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	- Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT tahun 2022 : 1 SK - Laporan Gelar Pengawasan Daerah : 1 laporan	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	200%	100%
6	01	03	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Laporan Pemutakhiran Tindaklanjut Hasil Pengawasan : 2 laporan	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	200%	100%
6	01	03	1.02		Asistensi dan Pendampingan									
6	01	03	1.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pendampingan dan asistensi : 4 laporan	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	200%	100%
6	01	03	1.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Pelaksanaan PMPRB DIY Tahun n-1 : 1 laporan	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	200%	100%

**RANCANGAN AHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9)	11=(10/4)
6	01	03	1.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Hasil monitoring dan evaluasi aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan Korupsi : 1 laporan</li> <li>- Laporan hasil pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah : 1 laporan</li> <li>- Laporan tindaklanjut perjanjian APIP dan APH : 1 laporan</li> <li>- Laporan triwulanan atas perkembangan pelaksanaan tugas Saberpungli tepat waktu : 4 laporan</li> </ul>	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	200%	100%
6	01	03	1.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Laporan Survey Penilaian Integritas : 1 laporan	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN serta agar mampu bersaing di bidang pengawasan, Inspektorat Daerah latimewa Yogyakarta terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan fungsinya guna memberi nilai tambah bagi penyelenggara pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pengawasan diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Inspektorat sampai dengan bulan Desember 2021 telah melakukan pemeriksaan reguler sebanyak 190 obyek pemeriksaan, melakukan pengukuran kinerja instansi atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tahun anggaran 2021 terhadap 37 SKPD di lingkungan Pemerintah DIY. Adapun hasil pengawasan dan tindaklanjut dari temuan hasil dari pemeriksaan tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut :

- a. BPK terdapat 1.108 rekomendasi BPK dan telah selesai ditindak lanjuti sejumlah 998 rekomendasi (86.46%);
- b. Inspektorat Jenderal Kemendagri terdapat 11 rekomendasi dan telah selesai ditindaklanjuti 11 rekomendasi (100%);
- c. Inspektorat DIY terdapat 1.212 rekomendasi dan telah selesai ditindaklanjuti 1.039 rekomendasi (85.73%);

dari data diatas maka rata-rata penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar 90,20% dari target sebesar 88%.

Capaian indikator kinerja tersebut dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	85	88	90	90	93.13	90.20	90	90	Capaian tersebut merupakan rata-rata penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK, Itjen Kemendagri dan Inspektorat

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan consulting Inspektorat DIY tahun 2021 telah dilaksanakan dengan program penyelenggaraan pengawasan dan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi melalui kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal:

a. Sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.

Pada sub kegiatan ini dilakukan pengawasan kinerja terhadap perangkat daerah bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan pada OPD telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

b. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, antara lain :

- Pengawasan regular, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbasis resiko pada obyek pengawasan OPD-OPD . Hasil dari pengawasan berbentuk Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang disusun secara komprehensif (menyeluruh) meliputi 5 (lima) aspek, yaitu tugas pokok dan fungsi, aspek keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta metode kerja/pengendalian intern dan melaksanakan inventarisasi temuan pengawasan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan.

Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Irjen Kementerian Dalam Negeri dan Instansi terkait.

- Pengujian laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari OPD, pengawasan dilakukan terhadap dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tiap bulan dari OPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Merupakan catatan pemeriksaan awal sebelum melakukan pengawasan di obyek pengawasan.
- Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).



Melakukan pemantauan terhadap pengembangan Hasil *Diagnostic Assesment* oleh masing-masing OPD sebagai bentuk implementasi Sistem Pengendalian Intern. Hasil berupa informasi jumlah SOP pada OPD dan implementasinya.

- *Cash Opname* dan *Stock Opname*, *Cash Opname* dan *Stock Opname* pada akhir Tahun Anggaran dilakukan secara serentak pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atas kondisi akhir pengelolaan keuangan dan persediaan barang dengan tujuan untuk percepatan penyusunan Laporan Keuangan pada neraca komponen aset lancar OPD. Hasilnya adalah memberikan keyakinan atas kondisi keuangan dan persediaan barang pada akhir tahun anggaran.
- c. Sub kegiatan Reviu Laporan Kinerja, antara lain:
- Evaluasi LKjIP, evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dilaksanakan setiap tahun atas LKjIP yang telah disusun oleh Perangkat Daerah dengan tujuan untuk menilai penyajian dan pengungkapan informasi dalam LKjIP serta menilai penggunaan informasi. Hasilnya berupa LHE LKjIP yang berisi rekomendasi. LHE LKjIP dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan penganggaran dan pelaporan kinerja yang terdiri dari Renstra, RKT dan Penetapan Kinerja yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran.
  - Reviu Kinerja Pemerintah Daerah/ Reviu SAKIP Kabupaten/Kota, reviu Kinerja atas Laporan Kinerja membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.
  - Reviu Dokumen Perencanaan, dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran termasuk didalamnya perencanaan dan penganggaran responsif gender, maka Kepala

Daerah menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Dokumen perencanaan tersebut meliputi : RPJMD, Renstra, RKPD/perubahan RKPD, Rencana Kerja SKPD/Perubahan Rencana Kerja SKPD, KUA-PPAS/KUPA-PPAS Perubahan, RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan dan RKA-PPKD/RKA-PPKD Perubahan.

d. Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan, antara lain:

- Pendampingan Penyusunan Laporan keuangan OPD, membantu OPD dalam melakukan proses penyusunan Laporan keuangan terkait dengan penetapan angka final pada aspek keuangan dan aset yang akan dijadikan sebagai angka-angka pada neraca OPD pada tahun yang berkenaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Reviu Atas Laporan Keuangan, melaksanakan reviu atas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dengan tujuan mendorong penyusunan dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan OPD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Sedangkan tujuan reviu Keuangan Pemerintah Daerah untuk memberikan keyakinan, keandalan informasi/laporan keuangan yang memadai atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebelum disampaikan oleh Gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

e. Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, antara lain:

- Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), melakukan EKPPD terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Laporan Hasil Sementara EKPPD disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati/Walikota se Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Pengawasan teknis umum kabupaten/kota, melakukan pengawasan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota yaitu capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar, ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh pemerintah daerah, akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah dengan obyek

pengawasan disepakati antara Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota.

f. Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal

- Kerjasama pengawasan internal ini dilakukan antar Inspektorat Kabupaten/Kota dan antar Inspektorat Provinsi seluruh Indonesia yang tergabung dalam AAPI (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia), yang dilakukan dalam bentuk telaah sejawat. Telaah sejawat dimaksudkan melakukan penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas organisasi APIP sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsinya, dan harapan pimpinan tertinggi organisasi; menyatakan pendapat tentang kesesuaian aktivitas APIP dengan Standar Audit, memberikan saran perbaikan kinerja APIP agar dapat memberikan nilai tambah kepada organisasi, dengan menjamin bahwa audit telah dilaksanakan oleh auditor yang berkompeten dan dilengkapi dengan pedoman kerja yang memadai.
- Melaksanakan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis khususnya terkait ketugasan mandatory seperti pendampingan dan pengawasan terhadap penanganan covid-19, vaksinasi dan pemulihan ekonomi nasional

g. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, melakukan desk dengan OPD-OPD atas tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan APIP rutin setiap bulan.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu:

a. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Melakukan proses penyelesaian kerugian Negara/daerah yang timbul karena Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi atau oleh pihak ke-3 baik karena hasil pemeriksaan APIP maupun BPK RI.

b. Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, antara lain:

- Pengawasan dengan tujuan tertentu dan pengembangan temuan, Melakukan pemeriksaan untuk mendorong berkurangnya pelanggaran/ penyelewengan terlebih korupsi, kolusi dan nepotisme juga untuk meningkatkan akuntabilitas aparat pemerintah terhadap aspirasi yang berkembang dari masyarakat melalui pengaduan masyarakat, media masa, dan tugas khusus serta kasus pengembangan temuan hasil pemeriksaan;

- Kegiatan pengusutan dilakukan apabila ada laporan/pengaduan dari masyarakat yang ditujukan kepada Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah (Presiden atau Gubernur) dan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat perintah untuk mengadakan pemeriksaan dan pengusutan.
  - Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK), untuk memberikan keyakinan terbatas, kehandalan dan keabsahan laporan, maka penyaluran DAK Fisik mensyaratkan agar laporan tersebut direviu oleh aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah.
3. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
- a. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, antara lain:
- Menyelenggarakan Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) untuk memaparkan temuan hasil pemeriksaan APIP antara lain hasil pemeriksaan: Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY dan Inspektorat DIY yang dihadiri oleh semua Kepala OPD se Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait lainnya. Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta juga memaparkan temuan hasil pemeriksaan Kabupaten/Kota pada acara Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) di Kabupaten/Kota masing-masing.
  - Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat DIY tahun 2022 yang diputuskan dengan Keputusan Gubernur.
- b. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan, antara lain:
- Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dengan Inspektorat Kabupaten/Kota dan mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional (RAKORWASDANAS) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis.
  - Berkontribusi dalam pengembangan profesi APIP melalui Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)
  - Melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan tingkat Daerah dan mengikuti pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan APIP tingkat Nasional serta tindak lanjut dengan BPK.

#### 4. Asistensi dan Pendampingan

##### a. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Pendampingan guna memberikan keyakinan yang memadai bagi pencapaian efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang bersifat konsultatif kepada OPD terhadap hal-hal yang menjadi hambatan dan permasalahan.

Hasilnya adalah memberikan rekomendasi/ saran atas kelemahan terhadap pengelolaan tugas dan fungsi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendampingan kepada OPD dalam penyusunan manajemen resiko masing-masing OPD.

##### b. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

- Penggerakan Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- Pendampingan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) kepada OPD-OPD dilingkungan Pemda DIY.

##### c. Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, antara lain:

- Membantu Tim Daerah dan Tim Pelaksana Teknis Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- Mengkoodinasikan pemenuhan capaian indikator area intervensi pencegahan korupsi KPK yang meliputi : Perencanaan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, dan Manajemen Aset Daerah.
- Membantu kelancaran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
- Kerjasama APIP-APH, dilaksanakan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Perjanjian kerja Sama (PKS) dilaksanakan antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH), yaitu Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

##### d. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (KLPD). Hasil pemetaan dapat

dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristik masing-masing K/L/PD serta berdasarkan hasil pemetaan empiris. Penilaian bersumber dari persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD), yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerja sama, dan *ekspert/ahli* dari beragam kalangan. Penilaian mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (*trading in influence*), pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ, pengelolaan SDM, sosialisasi.

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam rangka mendukung terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peran pengawasan merupakan faktor penting dalam mendorong terwujudnya aparat pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel. Sesuai Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menentukan: Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 16 (3) disebutkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada tahapan kegiatan:

- a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- b. pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. pelaksanaan program strategi nasional di daerah;
- d. berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- e. pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isu-isu yang ditetapkan Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. monitoring dan evaluasi pencegahan pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk didalamnya penyelenggaraan survey penilaian integritas oleh KPK;
- b. pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem informasi pengawasan yang terintegrasi;
- c. peningkatan kapabilitas APIP terkait pemenuhan jumlah, jam diklat, per orang per tahun;
- d. pelaksanaan ketugasan mandatori pengawasan dari pusat antara lain reviu Perencanaan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah serta Manajemen Pajak Daerah sebagaimana amanat KPK terkait *Monitoring Control for Prevention (MCP)* yang memberikan informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah dalam rangka tindaklanjut Rencana Aksi Pencegahan Korupsi tingkat nasional [S1]
- e. pemenuhan alokasi anggaran pengawasan 0,6% dari belanja daerah untuk program dan kegiatan pengawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas Aparat Pengawas

### 2.3.1. Tugas dan Fungsi

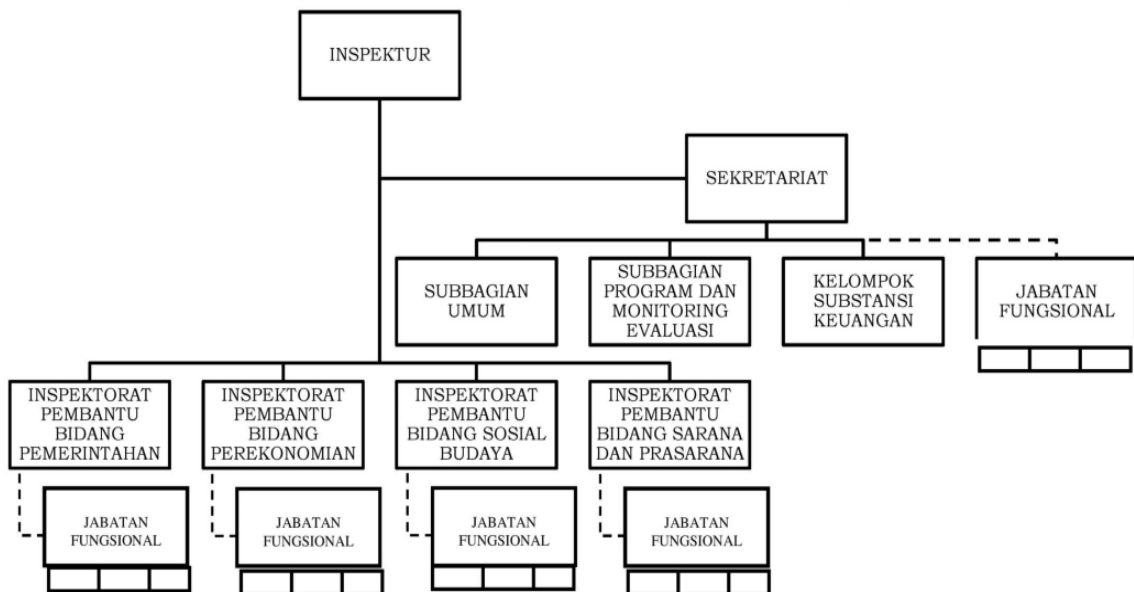
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program kerja Inspektorat;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan pelaksanaan urusan keistimewaan;
- e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan pengawasan;
- i. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di daerah Kabupaten/Kota;
- j. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- k. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
- l. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Inspektorat; dan

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  - 1. Subbagian Umum;
  - 2. Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi; dan
  - 3. Kelompok Substansi Keuangan.
- c. Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan;
- d. Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian;
- e. Inspektorat Pembantu Bidang Sosial Budaya;
- f. Inspektorat Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana; dan
- g. Jabatan Fungsional.



**2.3.2. Keadaan Pegawai**

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai pegawai sebanyak 92 (sembilan puluh dua) orang per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:



No	Jabatan		Jumlah
1	Struktural	a. Inspektur (Eselon II.A)	-
		b. Sekretaris (Eselon III.A)	1
		c. Inspektur Pembantu (Eselon III.A)	4
		d. Kepala Sub Bagian (Eselon IV.A)	3
2	Fungsional tertentu	Auditor	43
		P2UPD	14
3	Fungsional Umum	Staf	17
4	Tenaga bantuan		10
<b>Jumlah</b>			<b>92</b>

Sumber : Sub Bagian Umum, Inspektorat DIY

### 2.3.3. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sebagai pendukung Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :

No	Uraian		Jumlah	Rupiah
	Jenis	Kelompok		
1	Peralatan dan Mesin	1. Alat Besar	6 unit	968.902.963,00
		2. Alat angkutan	17 unit	2.057.595.442,00
		3. Alat Pertanian	1 unit	750.000,00
		4. Alat Kantor dan Rumah Tangga	236 unit	3.855.231.791,42
		5. Alat studio, komunikasi dan Pemancar	50 unit	615.186.720,00
		6. Alat Kedokteran dan Kesehatan	9 unit	29.184.000,00
		7. Alat Laboratorium	2 unit	17.902.500,00
		8. Komputer	242 unit	2.096.140.074,00
2	Gedung dan Bangunan	1. Bangunan Gedung	4 unit	23.960.616.400,00
		2. Tugu, titik control/pasti	1	607.554.407,00
3	Jalan, Jaringan, Irigasi	1. Jalan dan jembatan	1	293.696.467,00
		2. Instalasi	3	817.464.416,00
		3. Jaringan	3	1.748.748.592,00
4	Aset Tetap Lainnya	Bahan Perpustakaan	794 buah	37.427.461,00
5	Aset lainnya	Aset Tak Berwujud	6	544.565.200,00
<b>Jumlah</b>				<b>39.011.802.641,42</b>

Sumber: Rekap Barang Inventaris per 31 Desember 2021, Sub Bagian Umum, Inspektorat DIY

Terkait dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat DIY dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Alat angkutan 17 unit terdiri dari kendaraan dinas/operasional roda empat 13 unit dan kendaraan Dinas/Operasional roda dua 4 unit. Dari 13 unit kendaraan

Dinas/Operasional roda empat yang digunakan untuk operasional pengawasan 10 unit, 1 unit untuk keperluan pimpinan dan 2 unit untuk kebutuhan kesekretariatan, dengan kondisi terdapat 2 unit mobil (pembelian tahun 1996 dan tahun 2000) yang dalam kondisi sering mengalami kerusakan. 10 unit kendaraan operasional yang digunakan untuk operasional pengawasan tidak memadai karena Tim yang ada sejumlah 16 Tim dengan obyek pemeriksaan yang berbeda-beda, kondisi ini merupakan hambatan aktivitas pemeriksaan. Untuk kendaraan dinas/operasional roda dua sebanyak 4 unit, 2 unit secara ekonomis sudah habis umurnya (pembelian tahun 2007), namun saat ini masih dimanfaatkan dan sering mengalami kerusakan. Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan penambahan 5 unit kendaraan Operasional roda empat dan 2 unit kendaraan dinas roda dua melalui pengadaan kendaraan dinas secara bertahap.

2. Komputer 242 unit terdiri dari:

- personal komputer 100 unit (komputer PC 42 unit dan laptop 58 unit), 19 unit komputer PC merupakan pengadaan tahun 2003-2013 sering mengalami kerusakan dan 4 unit dalam kondisi rusak berat serta 26 unit laptop merupakan pengadaan tahun 2008-2011 yang sering mengalami kerusakan dan 6 unit rusak berat;
- peralatan personal komputer 99 unit (monitor :8 unit, printer 36 unit, scanner:26 unit, eksternal hardisk: 29 unit);
- printer 36 unit, 18 unit merupakan pengadaan tahun 2004-2012 sering mengalami kerusakan dan 8 unit dalam kondisi rusak berat, serta kurang memenuhi kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pengadaan komputer, laptop dan printer untuk mendukung pelaksanaan tupoksi dan support dengan perkembangan teknologi secara bertahap.

3. Alat kantor dan rumah tangga sebanyak 236 unit terdiri dari :

- Alat Kantor 130 unit : mesin ketik 3 unit, alat penggandaan 1 unit, alat penyimpan perlengkapan kantor 89 unit (filing cabinet:27 unit, lemari kaca:10 unit, rak besi:48 unit, brankas:1 unit ), lemari besi/metal:1, alat kantor lainnya 37 unit)
- Alat Rumah Tangga 88 unit : meubelair 27 unit, alat pendingin 44 unit, alat rumah tangga lainnya 11 unit , alat pemadam kebakaran (alarm kebakaran):6 unit
- Meja dan kursi kerja/rapat pejabat 18 unit: meja rapat pejabat 8 unit, kursi kerja pejabat: 7, lemari arsip pejabat 3 unit

Terkait alat penyimpan perlengkapan kantor berupa filing kabinet 27 unit, 23 unit merupakan pengadaan tahun 1979-1993 yang digunakan sebagai penyimpan

dokumen-dokumen pada ruangan kerja sekretariat maupun bidang-bidang, makan untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan dilakukan pengadaan secara bertahap.

4. Alat studio, komunikasi dan Pemancar sebanyak 50 unit terdiri dari:

- alat studio 45 unit (peralatan studio audio:20 unit (proyektor attachment 3 unit, UPS 2 unit, power amplifier 2 unit, professional sounsystem 2 unit, modulation monitor speaker kabaret 5 unit/set, audio mixing stasioner 1 unit, audio amplifier 2 unit, microphone wireless MC 4 unit);
- peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah: 10 unit (sketch master 5 unit, theodolite/peralatan ukur tanah 5 unit);
- alat studio lainnya 15 unit.

Terkait peralatan ukur dengan saat ini belum memenuhi kebutuhan alat dukung pemeriksaan, maka akan dilakukan pengadaan secara bertahap.

5. Aset tak berwujud sebanyak 6 terdiri dari:

- 1 unit aplikasi system analisis spesifikasi hardware (sudah tidak berfungsi);
- 1 unit aplikasi share point (sudah tidak berfungsi);
- 1 unit aplikasi kearsipan LHP;
- 1 unit aplikasi komputer hibah dari Kemendagri (sudah tidak berfungsi);
- 1 unit aplikasi program kerja pengawasan (Siwaris);
- 1 unit aplikasi SIM HP.

Inspektorat DIY telah mengembangkan Sistem Informasi untuk mendukung kegiatan pengawasan yang terdiri dari Sistem Informasi Hasil Pengawasan (SIM-HP) dan Sistem Informasi Pengawasan berbasis Risiko (SiWaris). Keberadaan dua sistem informasi ini masih belum memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Untuk itu Inspektorat di Tahun 2022 merancang sistem informasi terintegrasi yang akan diwujudkan dalam bentuk blueprint (cetak biru) Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi dengan konsep *Enterprise Resource Planning* (ERP) yaitu suatu model sistem informasi yang memungkinkan organisasi, dalam hal ini Inspektorat, untuk meng-otomasi dan meng-integrasikan proses-proses bisnis utamanya. ERP diharapkan dapat memecah kebuntuan berbagai hambatan fungsional tradisional dalam organisasi dengan cara mem-fasilitasi sharing/berbagai data, berbagai aliran informasi, dan mengenalkan/menyalurkan praktik-praktik bisnis yang umum diantara semua pengguna di Inspektorat DIY dan lebih luas lagi di Pemda DIY. Dengan konsep ERP ini, maka system informasi yang dimiliki Inspektorat DIY akan dilebur menjadi satu sistem informasi besar yang terintegrasi. Sistem informasi pengawasan terintegrasi ini akan mulai diimplementasikan pengembangannya secara bertahap mulai tahun

2023 mengacu pada *blueprint* yang telah disusun, dengan prioritas pengembangan *core business* pengawasan dan selanjutnya administrasi kesekretariatan.

#### **2.4. Review Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Review rancangan awal rencana kerja Inspektorat dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal rencana kerja tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Inspektorat Tahun 2023. Untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan dalam penganggaran tahun 2023, yang berakibat terdapat beberapa perubahan indikator, target capaian serta pagu indikatif sebagaimana hasil review yang disajikan dalam tabel berikut:

RANCANGAN AHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Tabel. 2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>Tercapainya Nilai PKKI Perangkat Daerah</b>	<b>91</b>	<b>9.205.959.179</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>91</b>	<b>18.398.764.113</b>	Penyeragaman indikator program penunjang perangkat daerah
1.1.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA Perubahan SKPD serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>45.992.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA Perubahan SKPD serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>28.377.500</b>	
1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DIY	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	19.332.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DIY	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	11.909.800	Efisiensi ATK, penggandaan, bahan computer, makan minum rapat
1.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DIY	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	8.490.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DIY	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	8.926.600	Efisiensi ATK, penggandaan, bahan computer, makan minum rapat , penggabungan 2 sub kegt
1.1.3.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	DIY	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	6.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	DIY	-	-	-	Digabung dengan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.1.4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DIY	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	11.970.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DIY	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	7.541.100	Efisiensi ATK, penggandaan, bahan komputer, makan minum rapat

RANCANGAN AHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.2.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Terlaksananya penyiapan gaji dan tunjangan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>75.310.979</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Terlaksananya penyiapan gaji dan tunjangan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>14.804.301.753</b>	
1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DIY	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	18.117.979	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DIY	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	14.751.275.953	sesuai keputusan TAPD
1.2.2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DIY	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	46.320.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DIY	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	45.840.000	Penyesuaian dengan SHBJ Tahun 2023
1.2.3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	DIY	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	10.873.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	DIY	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	7.185.000	efisiensi ATK dan penggandaan
1.3.	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>30.000.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>17.912.100</b>	
1.3.1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DIY	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 laporan	30.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DIY	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 laporan	17.912.100	Efisiensi kertas, bahan komputer, bahan cetak, makan minum rapat

RANCANGAN AHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.4.	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai; Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>	<b>100%</b>	<b>549.250.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai; Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>	<b>100%</b>	<b>366.486.600</b>	
1.4.1.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DIY	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen	82.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DIY	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen	7.217.800	Penyesuaian terkait surat edaran tim pelaksana kegiatan internal Pemda yang tidak berhonor
1.4.2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DIY dan luar DIY	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 orang	467.250.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DIY dan luar DIY	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 orang	359.268.800	peningkatan kompetensi profesional JFT secara bertahap, menyesuaikan keuangan daerah
1.5.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>1.425.265.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, enyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>483.763.100</b>	

RANCANGAN AHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.5.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DIY	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	30.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DIY	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	12.027.000	Efisiensi peralatan kelistrikan
1.5.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DIY	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	33.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DIY	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	54.810.100	Pengabungan dg sub kegt Penataanusahaan arsip dinamis pada SKPD
1.5.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DIY	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	8.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DIY	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	31.898.500	penambahan tersebut terkait kebutuhan di gedung baru Inspektorat
1.5.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DIY	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	25.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DIY	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	24.997.500	penyesuaian dengan SHBJ 2023
1.5.5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DIY	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	24.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DIY	-	-	-	menindaklanjuti SE Sekda
1.5.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DIY dan luar DIY	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	503.265.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DIY dan luar DIY	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	274.230.000	menindaklanjuti SE Sekda
1.5.7.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DIY	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 dokumen	52.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DIY	-	-	-	Digabung dg sub kegt Penyediaan peralatan dan perlengkapan
1.5.8.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DIY	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	750.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DIY	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	90.000.000	pengadaan aplikasi pengawasan yang terintegrasi akan dilaksanakan secara bertahap



RANCANGAN AHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.6.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Mebel, Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>100%</b>	<b>4.650.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Mebel, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>100%</b>	<b>316.243.700</b>	
1.6.1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DIY	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	500.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DIY	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	0	pengadaan kendaaran dinas jabatan yg dialihkan ke Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY sesuai dengan hasil desk RKA dengan TAPD
1.6.2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DIY	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	1.250.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DIY	-	-	-	menindaklanjuti SE Sekda
1.6.3.	Pengadaan Mebel	DIY	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	200.000.000	Pengadaan Mebel	DIY	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	56.300.200	sesuai hasil inventarisasi dari pengadaan mebel untuk gedung baru Inspektorat tahun 2022

RANCANGAN AHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.6.4.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DIY	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	143 unit	2.500.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DIY	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	98 unit	206.696.800	pengadaan sarana dan prasarana pendukung tupoksi dilaksanakan secara bertahap
1.6.5.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DIY	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	200.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DIY	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	53.246.700	disesuaikan dengan kebutuhan terkait kekurangan sarana dan prasana pendukung gedung baru Inspektorat
1.7.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>100%</b>	<b>1.508.638.200</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>100%</b>	<b>1.5.69.271.000</b>	
1.7.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	6.510.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	6.202.000	disesuaikan dengan kebutuhan
1.7.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	358.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	500.420.000	estimasi kenaikan tagihan listrik dan kebutuhan terkait kenaikan voltase
1.7.3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	26.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	9.600.000	penyesuaian terkait kebutuhan gedung baru Inspektorat

RANCANGAN AHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.7.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 paket	1.118.128.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 paket	1.053.049.000	Menyesuaikan dengan SHBJ tahun 2023
1.8.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>100%</b>	<b>921.503.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>100%</b>	<b>812.408.360</b>	
1.8.1.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DIY	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DIY	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	efisiensi
1.8.2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DIY	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DIY	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	efisiensi

RANCANGAN AHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.8.3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DIY	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 unit	367.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DIY	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 unit	302.296.800	Penyesuaian dengan SHBJ Tahun 2023 dan kebutuhan
1.8.4.	Pemeliharaan Mebel	DIY	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	3.000	Pemeliharaan Mebel	DIY	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0	efisiensi
1.8.5.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DIY	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	444.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DIY	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	115.564.560	Penyesuaian dengan SHBJ Tahun 2023
1.8.6.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DIY	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DIY	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	394.547.000	merupakan penggabungan sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan sub kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor serta kebutuhan gedung Inspektorat
2.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>		<b>Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana aparatur</b>	<b>91%</b>	<b>7.591.124.100</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>		<b>Persentase pengawasan yang sesuai PKPT bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>6.240.695.000</b>	sesuai hasil keputusan Tim Penyusun Renstra OPD

RANCANGAN AHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.1.	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>		<b>Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan APIP</b>	<b>100%</b>	<b>6.712.822.200</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>		<b>Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan APIP</b>	<b>100%</b>	<b>5.437.313.000</b>	
2.1.1.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	DIY	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16 laporan	783.243.300	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	DIY	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16 laporan	350.349.900	efisiensi bahan komputer, makanan dan minuman rapat serta jasa audit yang disesuaikan pelaksanaan pengawasan kinerja
2.1.2.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	DIY dan luar DIY	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	174 laporan	3.850.816.200	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	DIY dan luar DIY	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	174 laporan	3.519.463.000	efisiensi bahan komputer, kertas, makan minum rapat
2.1.3.	Reviu Laporan Kinerja	DIY	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	113 laporan	967.404.900	Reviu Laporan Kinerja	DIY	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	113 laporan	920.554.200	efisiensi bahan komputer, kertas, makan minum rapat
2.1.4.	Reviu Laporan Keuangan	DIY	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	38 laporan	477.750.000	Reviu Laporan Keuangan	DIY	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	38 laporan	232.991.000	efisiensi bahan komputer, kertas, makan minum rapat, jasa audit
2.1.5.	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	DIY	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	21 laporan	408.154.950	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	DIY	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	21 laporan	376.407.600	efisiensi ATK, makan minum rapat

RANCANGAN AHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.1.6.	Kerjasama Pengawasan Internal	DIY	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	189.306.600	Kerjasama Pengawasan Internal	DIY	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	17.728.500	Pemindahan Forum AAIP dan kontribusi asosiasi dari sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan sesuai desk pra RKA 2023 dengan TAPD, secara daring
2.1.7.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	36.146.250	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	19.818.800	efisiensi ATK, makan minum rapat
<b>2.2.</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>		<b>Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>100%</b>	<b>878.301.900</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>		<b>Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>100%</b>	<b>803.382.000</b>	
2.2.1.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	DIY	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 laporan	44.100.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	DIY	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 laporan	34.956.400	efisiensi ATK, makan minum rapat
2.2.2.	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	DIY	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	90 Laporan	834.201.900	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	DIY	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	90 Laporan	768.425.600	efisiensi ATK, bahan komputer, makan minum rapat
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>		<b>Persentase indikator MCP-KPK</b>	<b>100%</b>	<b>1.209.600.800</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>		<b>Persentase kepatuhan pelaporan LHKASN</b>	<b>100%</b>	<b>585.789.100</b>	sesuai hasil keputusan Tim Penyusun Renstra OPD

RANCANGAN AHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.1.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	94%	191.152.500	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	100%	32.704.500	
3.1.1.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	DIY	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 rekomendasi	57.262.800	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	DIY	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 rekomendasi	4.860.000	efisiensi ATK, bahan komputer, makan minum rapat, secara daring
3.1.2.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	DIY	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 rekomendasi	133.889.700	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	DIY	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 rekomendasi	27.844.500	Pelaksanaan Forum AAIPI dan kontribusi asosiasi dipindahkan ke sub kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal sesuai desk pra RKA 2023 dengan TAPD, secara daring
3.2.	Pendampingan dan Asistensi		Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	100%	1.018.448.300	Pendampingan dan Asistensi		Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	100%	553.084.600	

RANCANGAN AHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.2.1.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	DIY	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	37 perangkat daerah	7.623.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	DIY	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	37 perangkat daerah	6.712.000	efisiensi makan minum rapat
3.2.2.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	DIY	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	37 perangkat daerah	50.190.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	DIY	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	37 perangkat daerah	9.685.900	efisiensi ATK, bahan komputer, makan minum rapat, sosialisasi secara daring
3.2.3.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	DIY dan luar DIY	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 kegiatan	800.000.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	DIY dan luar DIY	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 kegiatan	384.780.700	efisiensi bahan computer, makan minum rapat, publikasi
3.2.4.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	DIY	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	37 perangkat daerah	160.635.300	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	DIY	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	37 perangkat daerah	152.986.000	
					<b>18.006.684.079</b>						<b>25.225.248.213</b>



## 2.5. Penelaahan Program dan Usulan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Rencana Kerja Inspektorat didiskusikan dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat bersama dengan pemangku kepentingan dan Bappeda. Pada forum OPD tersebut tidak ada usulan terkait dengan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, namun demikian terdapat beberapa koreksi dalam perumusan hasil tolok ukur program serta menciptakan sinergi pengawasan antar APIP dalam rangka mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Usulan tersebut akan ditindaklanjuti dalam penyusunan dokumen perencanaan Inspektorat tahun 2023.

## BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pelaksanaan pengawasan perlu disusun melalui perencanaan yang matang, sehingga tidak lagi terjadi kegiatan pengawasan yang tumpang tindih ataupun pembatalan obyek pemeriksaan. Terkait dengan hal tersebut dan mengacu pada Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, Inspektorat DIY melaksanakan sinergitas kebijakan pengawasan di daerah dengan mengedepankan peran *consulting* dan *quality assurance* terhadap Obyek Pemeriksaan dan sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Pemerintah Daerah DIY dapat dicapai secara optimal.

Sebagaimana tujuan Pembangunan DIY sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosioekonomi dan Sosiokultural Masyarakat
2. Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (good government)

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan diharapkan mendukung tujuan pembangunan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dari sisi *Quality Assurance*, yang berarti dengan fungsi pengawasannya Inspektorat diberi tanggung jawab untuk menjamin kualitas kinerja perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memenuhi standar-standar pelayanan dan operasional yang telah ditetapkan untuk mendukung capaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

### 3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan gambaran suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan. Dalam rangka mendukung capaian tujuan pembangunan DIY sebagaimana dicantumkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026, tujuannya adalah terselenggaranya terselenggarannya fungsi *consulting* (konsultasi, sosialisasi, asistensi) dan *quality assurance* (audit, reviu, pemantauan, evaluasi) atas penyelenggaraan pemerintah di Pemda DIY melalui Pembinaan dan Pengawasan.

Adapun sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan internal

2. Meningkatnya efektifitas pengendalian internal
3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah

### 3.2. Program dan Kegiatan

#### a. Program.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Keuangan dan Pembangunan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, program yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

#### b. Kegiatan/Sub Kegiatan.

Kegiatan/Sub Kegiatan dilakukan untuk merealisasikan program dan cerminan dari strategi kongkrit organisasi untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
  - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 1.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - 1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
  - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - 2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - 3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
  - 4.1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
  - 4.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah :
  - 5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 5.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 5.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 5.6. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
  - 6.1. Pengadaan Mebel
  - 6.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 6.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
  - 7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 7.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 7.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
  - 8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 8.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 8.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9. Penyelenggaraan Pengawasan Internal :
  - 9.1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
  - 9.2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
  - 9.3. Reviu Laporan Kinerja
  - 9.4. Reviu Laporan Keuangan
  - 9.5. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
  - 9.6. Kerjasama Pengawasan Internal

- 9.7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
10. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :
  - 10.1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
  - 10.2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
11. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
  - 11.1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
  - 11.2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
12. Asistensi dan Pendampingan :
  - 12.1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
  - 12.2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
  - 12.3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
  - 12.4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

**Tabel 3-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program ( <i>outcome</i> ), Kegiatan ( <i>output</i> ), dan subkegiatan	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan kinerja dan keuangan</li> <li>Presentase peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</li> <li>Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</li> <li>Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur</li> </ol> Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DIY	100%	26.871.043.333	APBD		91	18.398.764.113
0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA Perubahan SKPD serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DIY	100%	37.896.000	APBD		100%	28.377.500
0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DIY	4 dokumen	18.411.000	APBD		3 dokumen	11.909.800
0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DIY	4 dokumen	8.085.000	APBD		4 dokumen	8.926.600
0.00.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DIY	0	0	APBD		0	0
0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DIY	5 laporan	11.400.000	APBD		5 laporan	7.541.100
0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyiapan gaji dan tunjangan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DIY	100%	17.271.861.224	APBD		100%	14.804.301.753
0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DIY	12 bulan	17.263.411.224	APBD		12 org/ bulan	14.751.275.953

RANCANGAN AHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DIY	12 dokumen	0	APBD		12 dokumen	45.840.000
0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DIY	17 laporan	8.450.000	APBD		18 laporan	7.185.800
0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	DIY	100%	16.800.000	APBD		100%	17.912.100
0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DIY	6 laporan	16.800.000	APBD		6 laporan	17.912.100
0.00.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai; Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DIY	100%	523.889.000	APBD		100%	366.486.600
0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DIY	2 Dokumen	78.889.000	APBD		2 dokumen	7.217.800
0.00.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	DIY	22 orang	445.000.000	APBD		22 orang	359.268.800
0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DIY	100%	747.845.000	APBD		100%	483.763.100
0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DIY	6 jenis	4.250.000	APBD		12 paket	12.027.000

RANCANGAN AHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DIY	14 jenis	92.850.000	APBD	Pengabungan dg sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 paket	54.810.100
0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DIY	0	0	APBD	Kebutuhan gedung Inspektorat Jl Cendana	12 paket	31.898.500
0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DIY	12 jenis	25.000.000	APBD		12 paket	20.797.500
0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DIY	0	0	APBD		-	0
0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DIY	12 bulan	479.300.000	APBD	Sesuai kebijakan Pemda	12 laporan	274.230.000
0.00.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DIY	0	0	APBD	Digabung pada sub kegt Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	0
0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DIY	1 dokumen	146.445.000	APBD	Pengadaan sistem pengawasan terintegrasi bertahap	1 dokumen	90.000.000
0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Mebel, Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DIY	100%	6.448.522.109	APBD		100%	316.243.700
0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	DIY	0	0	APBD	Sesuai kebijakan Pemda	-	0
0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	DIY	0	0	APBD	Sesuai kebijakan Pemda	-	0
0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	DIY	11 jenis	3.537.954.000	APBD		1 paket	56.300.200
0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DIY	72 unit	1.833.278.109	APBD	Sesuai kebijakan Pemda	98 unit	506.696.800
0.00.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DIY	100%	1.077.290.000	APBD		1 unit	53.246.700



RANCANGAN AHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program ( <i>outcome</i> ), Kegiatan ( <i>output</i> ), dan subkegiatan	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DIY	100%	1.388.480.000	APBD		100%	1.869.271.000
0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DIY	12 bulan	6.200.000	APBD		12 laporan	6.202.000
0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DIY	12 bulan	317.396.000	APBD		12 laporan	500.420.000
0.00.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DIY	0	0	APBD		12 laporan	9.600.000
0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DIY	12 bulan	1.064.884.000	APBD		12 paket	1.053.049.000
0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DIY	100%	435.750.000	APBD		100%	812.408.360
0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DIY	0	0	APBD		-	0
0.00.01.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DIY	0	0	APBD		-	0
0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	DIY	17 unit	350.000.000	APBD		18 unit	302.296.800
0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	DIY	0	0	APBD		-	0
0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DIY	70 unit	85.750.000	APBD		50 unit	115.564.560
0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DIY	0	0	APBD	Untuk memenuhi standar kelayakan fungsi gedung baru	0	394.547.000

RANCANGAN AHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  <b>Persentase pengawasan yang sesuai PKPT bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	DIY	90%	7.229.642.000	APBD	<b>Indikator program sesuai Renstra 2023-2026</b>	100%	6.240.695.000
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	DIY	100%	6.393.164.000	APBD		100%	5.437.313.000
6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	DIY	16 laporan	745.946.000	APBD		16 laporan	350.349.900
6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	DIY	174 laporan	3.667.444.000	APBD		174 laporan	3.519.463.000
6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	DIY	113 laporan	921.338.000	APBD		113 laporan	920.554.200
6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	DIY	38 laporan	455.000.000	APBD		38 laporan	232.991.000
6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	DIY	21 laporan	388.719.000	APBD		21 laporan	376.407.600
6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	DIY	2 Kesepakatan	180.292.000	APBD		2 Kesepakatan	17.728.500
6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	DIY	2 Dokumen	34.425.000	APBD		2 Dokumen	19.818.800
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	DIY	100%	836.478.000	APBD	100%	803.382.000	

RANCANGAN AHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	DIY	4 laporan	42.000.000	APBD		4 laporan	34.956.400
6.01.02.1.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	DIY	86 Laporan	794.478.000	APBD		90 Laporan	768.425.600
<b>6.01.03</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Persentase kepatuhan pelaporan LHKASN</b>	DIY	<b>94%</b>	<b>670.374.000</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>585.789.100</b>
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	DIY	100%	182.050.000	APBD		100%	32.704.500
6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	DIY	1 rekomendasi	54.536.000	APBD	Koordinasi dengan pusat dilaksanakan daring	1 rekomendasi	4.860.000
6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	DIY	2 laporan	127.514.000	APBD	Koordinasi dengan pusat dilaksanakan daring	2 rekomendasi	27.844.500
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi , Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	DIY	100%	488.324.000	APBD		100%	553.084.600
6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	DIY	37 perangkat daerah	7.260.000	APBD		37 perangkat daerah	5.632.000
6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	DIY	37 perangkat daerah	47.800.000	APBD	Sosialisasi dilaksanakan daring	37 perangkat daerah	9.685.900
6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	DIY	4 kegiatan	280.278.000	APBD		4 kegiatan	384.780.700
6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	DIY	37 perangkat daerah	152.986.000	APBD		37 perangkat daerah	152.986.000
<b>Jumlah</b>					<b>34.771.059.333</b>				<b>25.225.248.213</b>

## **BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program kerja, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat DIY tahun 2023 dengan indikator kinerja dijabarkan dalam 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan.

Pagu indikatif sebagaimana telah dientry dalam SIPD tahun 2023 direncanakan sebesar Rp25.225.248.213,00 terdiri dari:

1. Belanja operasi sebesar Rp24.909.004513,00
2. Belanja modal sebesar Rp 316.243.700,00

Rumusan rencana program kerja, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat DIY tahun 2023 disajikan dalam tabel 4. berikut ini :

Tabel 4. Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Indikatif Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Lokasi
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
0.00.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>91</b>					<b>18.398.764.113</b>	<b>27.175.917.914</b>	DIY
0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Dukungan 0.18% terhadap tercapainya nilai PKKI program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	28.377.500	48.581.500	DIY
0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen			11.909.800	20.298.000	DIY
0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen			8.926.600	8.915.000	DIY
0.00.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 dokumen			0	6.800.000	DIY
0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan			7.541.100	12.568.500	DIY
0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Dukungan 71.00% terhadap tercapainya nilai PKKI program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	14.804.301.753	19.081.713.304	DIY
0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan			14.751.275.953	19.023.877.304	DIY
0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen			45.840.000	46.320.000	DIY
0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan			7.185.800	11.516.000	DIY

RANCANGAN AHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Lokasi
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Dukungan 0,11% terhadap tercapainya nilai PKKI program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	17.912.100	31.500.000	DIY
0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 laporan			17.912.100	31.500.000	DIY
0.00.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Dukungan 2,46% terhadap tercapainya nilai PKKI program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	366.486.600	576.700.000	DIY
0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen			7.217.800	86.100.000	DIY
0.00.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 orang			359.268.800	490.600.000	DIY dan Luar DIY
0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Dukungan 4,29% terhadap tercapainya nilai PKKI program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	483.763.100	795.128.000	DIY
0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket			12.027.000	31.500.000	DIY
0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket			54.810.100	33.000.000	DIY
0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket			31.898.500	8.000.000	DIY
0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket			20.797.500	25.000.000	DIY

RANCANGAN AHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Lokasi
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-			0	25.200.000	DIY
0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan			274.230.000	528.428.000	DIY dan Luar DIY
0.00.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 dokumen			0	54.000.000	DIY
0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen			90.000.000	90.000.000	DIY
0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Dukungan 9.14% terhadap tercapainya nilai PKKI program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	316.243.700	3.937.500.000	DIY
0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0			0	1.312.500.000	DIY
0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket			56.300.200	0	DIY
0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	98 unit			206.696.800	2.625.000.000	DIY
0.00.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit			53.246.700	0	DIY
0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Dukungan 7.94% terhadap tercapainya nilai PKKI program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	1.569.271.000	1.584.070.110	DIY
0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan			6.202.000	6.835.500	DIY

RANCANGAN AHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Lokasi
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan			500.420.000	375.900.000	DIY
0.00.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan			9.600.000	27.300.000	DIY
0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 paket			1.053.049.000	1.174.034.610	DIY
0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Dukungan 4.88% terhadap tercapainya nilai PKKI program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	812.408.360	1.120.725.000	DIY
0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-			0	105.000.000	DIY
0.00.01.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-			0	10.500.000	DIY
0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 unit			302.296.800	385.875.000	DIY
0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-			0	3.150.000	DIY
0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit			115.564.560	466.200.000	DIY
0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-			394.547.000	150.000.000	DIY



RANCANGAN AHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Lokasi
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
6.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Persentase pengawasan yang sesuai PKPT bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>					<b>6.240.695.000</b>	<b>7.970.680.306</b>	DIY
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal					Dukungan 88,03% terhadap persentase pengawasan yang sesuai PKPT bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 100%	100%	5.437.313.000	7.048.463.311	DIY
6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16 laporan			350.349.900	822.405.465	DIY
6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	174 laporan			3.519.463.000	4.043.357.010	DIY dan Luar DIY
6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	113 laporan			920.554.200	1.015.775.145	DIY
6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	38 laporan			477.3170.000	501.637.500	DIY
6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	21 laporan			232.991.000	428.562.698	DIY
6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan			17.728.500	198.771.930	DIY
6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen			19.818.800	37.953.563	DIY
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					Dukungan 11,97% terhadap persentase pengawasan yang sesuai PKPT bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 100%	100%	803.382.000	922.216.995	DIY

RANCANGAN AHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

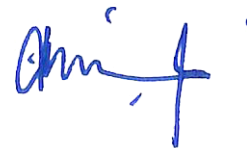
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Lokasi
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 laporan			34.956.400	46.305.000	DIY
6.01.02.1.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	90 Laporan			768.425.600	875.911.995	DIY
<b>6.01.03</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Persentase kepatuhan pelaporan LHKASN</b>	<b>100%</b>					<b>585.789.100</b>	<b>1.270.080.840</b>	DIY
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					Dukungan 10,92% terhadap pencapaian Persentase kepatuhan pelaporan LHKASN	100%	32.704.500	200.710.125	DIY
6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 rekomendasi			4.860.000	60.125.940	DIY
6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 rekomendasi			27.844.500	140.584.185	DIY
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi					Dukungan 84,20% terhadap pencapaian Persentase kepatuhan pelaporan LHKASN	100%	553.084.600	1.069.370.715	DIY
6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	37 perangkat daerah			5.632.000	8.004.150	DIY
6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	37 perangkat daerah			9.685.900	52.699.500	DIY
6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 kegiatan			384.780.700	840.000.000	DIY
6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	37 perangkat daerah			152.986.000	168.667.065	DIY
<b>Jumlah</b>								<b>25.225.248.213</b>	<b>36.416.679.060</b>	

## BAB 5 PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Akhir Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 disusun sebagai acuan pada penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditargetkan dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Rencana kerja ini merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2023-2026.

Yogyakarta, 2022

Plt. INSPEKTUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



AMIN PURWANI, SH, M.Ec., Dev.  
NIP. 19680713 199803 2 003



**Inspektorat**  
**Kompleks Youth Centre, Jalan Kebon Agung,**  
**Tlogoadi, Mlati, Sleman**  
**0274 - 512567**